**MANAJEMEN KEBIJAKAN TENTANG PENDIDIKAN GURU**

**SEKOLAH DASAR**

***POLICY MANAGEMENT ON PRIMARY SCHOOL***

***TEACHER EDUCATION***

**Yosmeri Zalfianti1, Alfroki Martha2**

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Adzkia

*Email:* *yzalfianti@gmail.com**1,* *alfroki.m@adzkia.ac.id**2*

|  |  |
| --- | --- |
| Article history : Received : 07-01-2025 Revised : 08-01-2025 Accepted: 10-01-2025 Published: 13-01-2025  | ***Abstract****The management of primary school teacher education policy plays a central role in ensuring the optimal quality of basic education. This policy includes planning, implementation, supervision, and evaluation of various aspects related to the development of teachers' competencies, such as academic qualifications, professional training, and teacher welfare. Strengthening the teacher education curriculum, renewing training programs based on local needs, and integrating technology into the learning process are priorities. In addition, the role of the government and educational institutions is vital in providing adequate resources and creating adaptive, inclusive, and sustainable policies to support the improvement of primary school teacher quality. Therefore, effective policies can have a positive impact on the enhancement of basic education quality and the achievement of national education goals.****Keywords: Management; Education Policy*** |

**Abstrak**

Manajemen kebijakan pendidikan guru sekolah dasar memegang peranan sentral dalam memastikan kualitas pendidikan dasar yang optimal. Kebijakan ini mencakup perencanaan,pelaksanaan,pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan perkembangan kompetensi guru, termasuk kualifikasi akademik, pelatihan profesional dan kesejahteraan guru. Penguatan kurikulum pendidikan guru, pembaharuan program pelatihan berbasis kebutuhan lokal, serta pengintegrasian teknologi dalam proses pembelajaran menjadi prioritas. Selain itu peran pemerintah dan lembaga pendidikan sangat penting dalam menyediakan sumber daya yang memadai, menciptakan kebijakan yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas guru sekolah dasar. Dengan demikian kebijakan yang efektif dapat memberi dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan dasar dan pencapaiuan tujuan pendidian nasional.

**Kata Kunci: manajemen; kebijakan pendidikan**

**PENDAHULUAN**

Pentinya Manajemen kebijakan pendidikan guru sekolah dasar adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan, pengelolaan, dan pengoptimalan kinerja guru SD. Kebijakan ini mencakup segala aspek, mulai dari rekrutmen, pelatihan, pengembangan profesional, evaluasi kinerja, hingga kesejahteraan guru. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi guru agar dapat mengajar secara efektif dan menghasilkan siswa yang berprestasi. Menurut Usman (2016: 13)”bahwa manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan proses dan hasil belajar peserta didik secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dalam mengembangankan potensi dirinya”

Menurut Sharma (dalam Usman, 2016: 14)” menjelaskan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu bidang studi dan praktik yang menaruh perhatian pada pelaksanaan organisasi pendidikan. Sementara, Aedi (2015: 51) mengungkapkan bahwa manajemen pendidikan sebagai proses keseluruhan rangkaian kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi aplikasi prinsip, konsep, fungsi, dan teori manajemen dengan menggunakan atau memanfaatkan keseluruhan sumber daya yang tersedia dan sesuai, baik personil, materil, maupun spirituil dalam mencapai pendidikan secara produktif, efektif dan efisien. Manajemen kebijakan pendidikan guru sekolah dasar mencakup beberapa aspek penting:

1. Perencanaan: Menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru SD, termasuk kurikulum pelatihan dan pengembangan profesional.
2. Rekrutmen dan seleksi: Menetapkan standar dan proses untuk merekrut calon guru SD yang berkualitas.
3. Pengembangan profesional: Menyediakan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru.
4. Evaluasi kinerja:Menerapkan sistem penilaian untuk memantau dan meningkatkan efektivitas pengajaran guru.
5. Kesejahteraan guru: Memastikan kompensasi dan kondisi kerja yang layak untuk menarik dan mempertahankan guru berkualitas.
6. Sertifikasi dan lisensi: Mengelola proses sertifikasi untuk memastikan guru memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
7. Distribusi guru: Mengatur penempatan guru secara merata di berbagai wilayah untuk mengatasi kesenjangan pendidikan.
8. Pengembangan kurikulum: Melibatkan guru dalam proses penyusunan dan pembaruan kurikulum sekolah dasar.
9. Teknologi pendidikan: Memfasilitasi penggunaan teknologi dalam pengajaran dan administrasi sekolah.
10. Kolaborasi pemangku kepentingan: Melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Landasan kebijakan dalam pendidikan merupakan pedoman dan petunjuk bagi pelaksana pendidikan didalam menjalankan kegiatan pendidikan. Oleh karena itu landasan tersebut biasanya mempunyai keterkaitannya yang erat dengan peraturan perundang undangan atau hukum yang berlaku pada suatu negara. Kemudian ditetapkan dan dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kekuasaan dalam bidang tersebut pada saat itu. Kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan pasti mempunyai dasar yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dengan memperhatikan pertimbangan pertimbangan kebutuhan masyarakat yang diimbangi dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Agustino, 2008). Manajemen pendidikan di sekolah dasar adalahuntuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di tingkat sekolah dasar.Tujuan Manajemen Kebijakan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Alasan pentingnya manajemen pendidikan di sekolah dasar adalah adanya tujuan dari manajemen pendidikan itu sendiri, yaitu bertujuan untuk menciptakan perencanaan pendidikan yang adil, bermutu, relevan dan bertanggung jawab, meningkatkan citra positif pendidikan, dan mengatasi mutu kualitas pendidikan, yang disebabkan oleh manajemennya. Pentingnya manajemen pendidikan di sekolah dasar juga sudah di kemukakan oleh banyak ahli, dibuktikan dengan banyak pengungkapan ahli yang dapat kita temukan diberbagai platform terkait dengan pentingnya manajemen di sekolah dasar. Dalam kemajuannya, manajemen pendidikan membutuhkan sumber daya manusia yang baik untuk manajemen pendidikan.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji manajemen kebijakan pendidikan guru sekolah dasar umumnya bersifat kualitatif,kuantitatif atau campuran, tergantung pada tujuan penelitian. Metode penelitian studi literatur melibatkan tahapan yang terstruktur untuk menyelidiki dan menganalisis literatur yang relevan dalam suatu bidang pengetahuan. Pertama, peneliti mengidentifikasi topik penelitian yang spesifik berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan (Smith, 2015). Langkah berikutnya adalah melakukan pencarian secara sistematis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dan terpercaya, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, laporan riset, dan artikel online (Brown et al., 2018). Setelah itu, informasi yang ditemukan dievaluasi secara kritis untuk memastikan kualitas dan keandalannya dalam mendukung studi tersebut (Johnson & Lee, 2020). Teknik analisis yang digunakan meliputi sintesis dan interpretasi data literatur untuk membangun argumen atau kerangka konseptual yang kokoh (Smith, 2015). Hasil dari studi literatur ini digunakan untuk memperluas pemahaman terhadap isu atau fenomena yang diteliti serta untuk membangun landasan teoretis yang solid bagi penelitian lebih lanjut (Brown et al., 2018).

**Tujuan Manajemen Kebijakan Pendidikan Dasar**

Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Machali (2012: 125) antara lain :

1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan (PAIKEM);
2. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara;
3. Terpenuhinya salah satu dari empat kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial);
4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien;
5. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan (tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan);
6. Teratasinya masalah mutu pendidikan;
7. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan dan akuntabel serta, meningkatnya citra pendidikan yang positif (Asmendri, 2012: 13).

Tujuan utama dari manajemen kebijakan pendidikan guru sekolah dasar adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Secara lebih spesifik, tujuan-tujuan tersebut meliputi:

1. Meningkatkan Kompetensi Guru: Kebijakan harus mendukung pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Guru SD harus mampu menguasai berbagai metode pembelajaran dan teknologi pendidikan yang relevan.
2. Meningkatkan Profesionalisme Guru: Dengan manajemen kebijakan yang baik, diharapkan tercipta budaya profesionalisme di kalangan guru, termasuk etos kerja etika profesi, dan komitmen terhadap pengembangan diri serta pengajaran yang berkualitas.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Guru: Kebijakan yang efektif harus memperhatikan kesejahteraan guru, baik dari segi finansial, karier, maupun kondisi kerja, sehingga guru merasa termotivasi untuk mengajar dengan maksimal.
4. Menciptakan Sistem Pengajaran yang Efektif dan Efisien: Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang dapat dijalankan dengan baik, di mana guru memiliki panduan yang jelas, sumber daya yang cukup, dan dukungan penuh dalam menjalankan tugasnya.
5. Meningkatkan Prestasi Sisw**a**: Tujuan akhir dari manajemen kebijakan guru SD adalah untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa, yang diharapkan dari hasil pembelajaran yang efektif dan berkualitas.

**Fungsi Manajemen Kebijakan Pendidikan Guru Sekolah Dasar**

Secara umum, menurut (Mustari 2014 : 7) fungsi manajemen dapat dibagi menjadi 10 bagian, yaitu :

1. Planning: Proses seorang manajemen mengantisipasi masa yang akan datang dan merumuskan alternatif terbaik dengan serangkaian tindakan. (Soebagio. 2000:14)
2. Organizing: pengelompokkan kegiatan yang diperlukan yaitu penetapan susunan organisasi seta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi. Organizing dapat pula dikaitkan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam pengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berguna dan berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian terdiri dari :menyediakan fasilitas-fasilitas fasilitasfasilitas perlengkapan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk penyusunan rangka kerja yang efisien.
3. mengelompokkan komponen kerja ke dalam struktur organisasi secara teratur.
4. membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi.
5. merumuskan dan menentukan metode serta prosedur.
6. Staffing: Merupakan proses seorang manajemen memilih, melatih, mengangkat dan memberhentikan bawahannya. (Soebagio. 2000:14)
7. Directing: Merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi-intruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan tersebut, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Mustari. 2014:8)
8. Leading: Adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain bertindak.
9. Coordinating:Merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubung-hubungkan dan menyelaraskan pekerjaanpekerjaan bawahan sehingga terjadi kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan bersama atau ujuan organisasi.
10. Motivating: Merupakan salah satu fungsi manajemen berupaa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara suka rela sesuai apa yang dikehendaki oleh atasan tersebut.(Mustari. 2014:9)
11. Controlling:Proses mengukur pelaksanaan yang sedang berjalan dan merupakan petunjuk terhadap beberapa tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. (Soebagio. 2000:15)
12. Reporting:Adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi baik secara lisan maupun secara tulisan. (Mustari. 2014:10)

**Permasalahan Manajemen Kebijakan yang Terjadi pada Pendidikan Guru Sekolah Dasar**

Meskipun banyak upaya telah dilakukan dalam manajemen kebijakan pendidikan guru sekolah dasar, terdapat beberapa permasalahan yang masih sering terjadi, antara lain:

1. Kurangnya Rekrutmen Guru yang Berkualitas: Masih banyak daerah yang kekurangan guru yang berkualifikasi baik, terutama di daerah terpencil. Proses rekrutmen yang belum optimal sering kali menyebabkan guru-guru yang kurang kompeten terlibat dalam proses pendidikan.
2. Kesenjangan dalam Pelatihan dan Pengembangan Guru: Tidak semua guru mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pelatihan dan pengembangan profesional. Banyak guru yang mengeluhkan minimnya akses terhadap program pelatihan yang relevan dengan tantangan pendidikan modern.
3. Kurangnya Insentif dan Kesejahteraan Guru: Kesejahteraan guru, terutama di tingkat SD, masih menjadi masalah besar. Gaji yang tidak memadai dan kondisi kerja yang kurang optimal sering kali menjadi fakto r penyebab rendahnya motivasi dan kinerja guru.
4. Birokrasi yang Berbelit-belit: Kebijakan yang diterapkan sering kali terhambat oleh birokrasi yang terlalu rumit, sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang telah dirumuskan tidak terlaksana dengan efektif.
5. Minimnya Dukungan terhadap Inovasi dalam Pengajaran: Kebijakan manajemen pendidikan guru SD sering kali kurang memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi dalam metode pengajaran. Ini menyebabkan keterbatasan dalam penerapan pendekatan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa saat ini.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menurut Stoner (1986) mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan,pengorganisasian, memimpin dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumbersumber organisasi lainnya untuk mencapai organisasi yang telah ditetapkan. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan,dalam rangka untuk mewujudkaan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatumasyarakat untuk suatu waktu tertentu secara khusus Sekolah Dasar(Muchlis, (Inggris Raya, 2002).

Dapat Lanjutan bahwa kebijakan pendidikan nasionaladalah suatu produk yang dijadikan panduan pengambilan keputusanpendidikan hukum-netral dan disesuaikan dengan lingkugan kehidupan pendidikan secara moderat.Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan yang dibuatuntuk menjadi pedoman dalam Bertindak, Mengarahkan kegiatan dalampendidikan atau organisasi atau sekolahdengan masyarakat dan pemerintah untukmencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakangaris umum untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan pada semua ketinggianpendidikan atau organisasi. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus (Subarsono, 2013), yakni:

1. Memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harusmemiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikanyang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
2. Memenuhi aspek legal-formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan oleh karena itu, perlunya menyediakan atas pra-syarat yang harus dipenuhiagar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuahwilayah. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusionalsesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di suatu wilayah hingga ia dapatdinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapatmunculkan suatu kebijakan pendidikan yang sah.
3. Memiliki konsepoperasional. Kebijakan pendidikan sebagai panduan sebuah yang bersifat umum,tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikandan ini adalah keharusan sebuah untuk mencapai kejelasan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsipendukung pengambilan keputusan.
4. Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh untuk ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan,pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berhubungan langsung denganpendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
5. Dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tidak terlepas dari keadaan yangsesungguhnya untuk ditindak lanjuti. Jika baik, maka dipertahankan ataudikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisadiperbaiki atau dievaluasi.
6. Memiliki sistematika kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas mencakup seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan keberlanjutan yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifatpragmatis, diskriminatif dan rapuhnya strukturnya akibat serangkaian faktor yanghilang atau saling berbenturan satu sama lain. Hal ini harus diperhatikandengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersekutu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; Bahkan kebijakan pendidikan di atas atau di samping dan di bawahnya.

Landasan yuridis atau kebijakan pendidikan Indonesia adalah keseluruhan konsep mengatur undang-undang yang menjadi titik tolak system pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, mengatur pemerintah, dan lainnya. Berikut kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan: Dalam pembukaan UUD 1945, antara lain : “Atas berkat Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian dari itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia danmseluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa (a) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (C) Pemerintah mengusahakan dan Menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya kurang dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.UU No. 20 Tahun 2003 tentang: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif Mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan rohani keagamaan, Pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

**KESIMPULAN**

Manajemen kebijakan pendidikan guru sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Dengan manajemen kebijakan yang baik, guru sekolah dasar dapat lebih kompeten, profesional, dan sejahtera, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada prestasi siswa. Namun, tantangan seperti kurangnya rekrutmen guru berkualitas, kesenjangan dalam pelatihan, dan birokrasi yang berbelit-belit perlu segera diatasi agar kebijakan pendidikan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

# DAFTAR PUSTAKA

Aliyyah Rusi Rusmiati, dkk. 2019. Manajemen Lembaga Pendidikan. Jakarta Selatan : Polimedia Publishing

Krstiawan Muhammad, dkk. 2017. Manajemen Pendidikan. Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama

[https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Kristiawan/publication/316100289Manajemen \_Pendidikan/links/58f049990f7e9b6f8](https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Kristiawan/publication/316100289_Manajemen_Pendidikan/links/58f049990f7e9b6f82dbe1b5/Manajemen-Pendidikan.pdf) [2dbe1b5/Manajemen-Pendidikan.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Kristiawan/publication/316100289_Manajemen_Pendidikan/links/58f049990f7e9b6f82dbe1b5/Manajemen-Pendidikan.pdf)

<https://etheses.uinsgd.ac.id/40789/1/MANAJEMEN%20PENDIDIKAN%20CETAK.pdf> <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1088/1/Manajemen%20Pendidikan.pdf>

[https://www.researchgate.net/profile/Rusi-Rusmiati-Aliyyah/Publication/341526704\_ MANAJE-MEN\_LEMBAGA\_PENDIDIKAN/Links/](https://www.researchgate.net/profile/Rusi-Rusmiati-Aliyyah/publication/341526704_MANAJEMEN_LEMBAGA_PENDIDIKAN/links/5ec5c075a6fdcc90d6892082/MANAJEMEN-LEMBAGA-PENDIDIKAN.pdf) [5ec5c075a6fdcc90d6892082/MANAJEMEN-LEMBAGA-PENDIDIKAN.Pdf](https://www.researchgate.net/profile/Rusi-Rusmiati-Aliyyah/publication/341526704_MANAJEMEN_LEMBAGA_PENDIDIKAN/links/5ec5c075a6fdcc90d6892082/MANAJEMEN-LEMBAGA-PENDIDIKAN.pdf)

[Https://Eprints.Uinsaizu.Ac.Id/18615/1/Buku%20ajar%20konsep%20dasar%20manajemen%20pendidikan%20by%20novan%20ardy%20wiyani\_removed.pdf](https://eprints.uinsaizu.ac.id/18615/1/buku%20ajar%20konsep%20dasar%20manajemen%20pendidikan%20by%20novan%20ardy%20wiyani_removed.pdf)